

**KAPASITAS DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKTOR
PERIKANAN KABUPATEN PANGANDARAN**

Sitri Mulyanti, Idham Ibtu

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Korespondensi penulis: Sitri90@gmail.com, idham.ibtu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan karena sektor Perikanan menjadi salah satu sector unggulan di Kabupaten Pangandaran yang dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi Pendapatan Asli Daerah. Kurang maksimalnya kinerja OPD dan optimalisasi sektor perikanan menjadi sorotan tersendiri bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kapasitas Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sektor Perikanan Kabupaten Pangandaran.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun penelitian ini berlokasi di Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran. Metode *purpose sampling* di gunakan untuk menetapkan narasumber dan para pihak yang di anggap dapat memberikan masukan data dan uji shahih dalam penelitian ini di pilih dengan teknik penetapan bertujuan.

Hasil penelitian ini menunjukkan Kapasitas Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan berpengaruh terhadap penurunan PAD dari tahun 2015 ke 2016 sebesar 96% dan peningkatan PAD terjadi dari 2016 ke 2017 sebesar 49.9%. Terhitung sejak tiga tahun terakhir (2015-2017) rata-rata perolehan PAD sebesar Rp. 2,070,959,670 atau 99,03%. Elemen kelembagaan dan tata kelola yang paling berpengaruh adalah visi misi, kemitraan dan anggaran, Elemen Sumber Daya Manusi yang paling berpengaruh SDM Aparatur yang belum sesuai dengan beban kerja dan SDM Nelayan tradisional. Elemen Kebijakan yang paling berpengaruh adalah Ketepatan Program dengan pembagian Retribusi sebesar 3,5 persen yang di sepakati oleh Bakul, nelayan dan penyelenggara TPI dan manfaat dari kebijakan tersebut adalah adanya tunjangan kesehatan dan hari raya bagi bakul dan nelayan sehingga berpengaruh terhadap Produktifitas nelayan.

Kata Kunci : Kapasitas, Organisasi Penyelenggara Daerah, PAD, Sektor Perikanan Kabupaten Pangandaran

Abstract

This research actions have been held by because the fisheries sector for example being one sector of superior quality compared to in district pangandaran who could give contribution who private for the regional genuine income. Less at the performance of old and optimization of the fisheries sector became a center of attention and hard to be solved for local government. For that reason it is his study aims to in order to understand the an annual production capacity of the department of marine, fisheries and food security agency to a significant increase in the regional genuine income the fisheries sector pangandaran district.

The method in use this research is a qualitative methodology. As for research is located in the maritime, fisheries and food security pangandaran. District method of purpose sampling in use to set a guest speaker and the parties who was assumed can give input data and test it in the study were chosen by a determination.

The results of the study this really shows you the caoacity on the department of marine, fisheries and food security agency in also had an impact on reductions in the amount of local revenue obtained from year 2015 to 2016 as much as 96% and ways to increase local revenue occurred from 2016 to 2017 as much as 49.9%. It is recorded since the past three years (2015-2017) publicly listed financial services company pad as much as rp. 2,070,959,670 or 99,03%. The element institutional affairs and governance which the most influence is the vision mission, draw up their own budget partnership, the decodebin element by opperassion and evil deeds power has risen and other the most influential will involve all stakeholder namely shortage of human resources which are not based on with the workloads and resources of traditional fishermen into. The element the fittest policy causes an effect the accuracy of the program by the distribution of levies which may be collected sebear 3,5 per cen which in of unfettered lust or given by large provision baskets, of fishermen as well as the only implementing body for forced sugar cane planting and so far benefited from this policy had become an annual allowance for their employees is the fact that there health and a day of feast for a basket and so it influences fishermen who sell their goods productivity fishermen who sell their goods.

Keywords : Capacity, Regional Carrier Organization, Local Revenue, The Fisheries Sector Pangandaran District

A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang agar daerah leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya secara luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk dapat melaksanakan kewenangan tersebut, faktor kapasitas pemerintah daerah dan faktor keuangan/anggaran menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Dibutuhkan kelembagaan yang memiliki kapasitas dengan di dukung anggaran yang memadai untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik.

Sebagai salah satu Daerah Otonomi yang baru, yang disahkan melalui UU No 21 tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran memiliki kewenangan melaksanakan Fungsi Pemerintahan sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satunya adalah mengelola potensi daerah sebagai upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan memperhatikan kondisi geografis wilayah Kabupaten Pangandaran

yang memiliki proporsi panjang pantai seluas 91 KM dengan jumlah nelayan yang ada sebanyak 5.084 orang atau 56,8% dan produksi perikanan tangkap pada tahun 2016 tercatat sebanyak 1.049.492,37 kg. (Sumber: Renstra DKPKP 2017-2021).

Sesungguhnya sektor perikanan memiliki potensi yang strategis dimasa depan, baik untuk Pendapatan Daerah maupun sebagai sumber utama konsumsi protein hewani masyarakat.

Potensi dan peluang di atas sesungguhnya memberikan gambaran akan keberhasilan tujuan Desentralisasi Kabupaten Pangandaran di masa depan. Kendati demikian Pendapatan Daerah yang dihasilkan dari sektor perikanan, terutama perikanan tangkap masih belum secara optimal tergali dan dimanfaatkan.

Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menjelaskan, permasalahan terkait sektor kelautan dan perikanan adalah nelayan Pangandaran masih tergolong nelayan tradisional dengan kemampuan melaut masih berdasarkan pengalaman bertahun-tahun menjadi nelayan, sehingga berpengaruh terhadap hasil tangkapan yang sesuai dengan jangkauan para nelayan.

(<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/03/03/o3gmiq284-potensi-laut-pangandaran-baru-tergali-15-persen>)

Faktor Sumberdaya Manusia yang masih belum memenuhi kebutuhan beban kerja, anggaran daerah yang masih di fungsikan ke pada beberapa program prioritas dan sebagai daerah yang belum lama melakukan pemekaran wilayah turut berpengaruh terhadap hasil capaian kinerja

dan pengoptimalan potensi-potensi PAD sektor perikanan. Hal tersebut didasarkan pada pengamatan penulis ketika melakukan pra penelitian.

Sehingga sebagai upaya pengoptimalan pendapatan daerah dari sektor Perikanan dengan memperhatikan potensi dan peluang di atas, maka menurut penulis yang terpenting adalah **Kapasitas Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Perikanan Kabupaten Pangandaran.**

B. Bahan Tinjauan Pustaka

B.1 Pengertian Kapasitas

Terdapat 4 pengertian kapasitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu ruang yang tersedia, daya serap (panas, listrik), keluaran maksimum:kemampuan berproduksi, kemampuan kapasitor untuk menghimpun muatan listrik. Mengutip dari Riyardi, Agung (2013:7), kapasitas berasal dari kata *capacity* dalam bahasa Inggris, namun pengertian *capacity* merujuk pada *The Free Dictionary Online* (2013), pengertiannya lebih luas dari pada kapasitas. Perbedaan kata kapasitas dan *capacity* terdapat pada penyederhanaan kata kemampuan di mana pada definisi kata *capacity* di perinci menjadi 3 kemampuan (*ability*), terdapat pada posisi dan peran seseorang (*position* dan *role*) dan terdapat pada kewenangan (*authority*), sehingga secara sederhana kapasitas diartikan sebagai kemampuan.

B.2 Kapasitas Organisasi Publik

Organisasi Publik di kembangkan dari teori organisasi. Oleh karena itu untuk memahami organisasi publik dapat di tinjau dari sudut pandang teori organisasi. Menurut Fahmi (2013.1) Organisasi Publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya.

Sedangkan kapasitas organisasi dalam istilah yang paling sederhana, merupakan kemampuan untuk melakukan aktivitas-aktivitas organisasi (Yu-Lee. 2002 dalam Irawan.2016:16). Di sektor publik kapasitas organisasi telah luas di definisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk menyusun, mengembangkan, memimpin dan mengendalikan, manusia, sumber daya keuangan, fisik dan informasi (Ingraham et.al dalam Irawan. 2016:16)

Sedangkan menurut Milen (2006 dalam Samsu, et.al:2015:95) mendefinisikan kapasitas organisasi publik sebagai kemampuan untuk menjalankan fungsi sebagai mana mestinya secara efektif, efisien dan terus menerus. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian dari kapasitas organisasi publik, yaitu kemampuan organisasi/pemerintah untuk menyusun, mengembangkan, memimpin dan mengendalikan aktivitas-aktivitas dan menjalankan fungsi dan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan secara terus menerus.

B.3 Pengertian Pelayanan Publik

Kegiatan pelayanan melibatkan dua unsur antara Pemberi dan Penerima layanan

yang saling berinteraksi. Gronroos (1990 dalam Ratminto dan Atik. 2005:2) mendefinisikan pelayanan sebagai suatu aktivitas atau rangkaian aktivitas, yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.

Sedangkan A. S. Munir dalam Riska (2016), mendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan yang tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan pengertian pelayanan adalah serangkaian produk kegiatan pemenuhan kebutuhan baik berupa kebutuhan fisik maupun jasa yang dilakukan oleh penyedia layanan dengan pengguna layanan yang melibatkan satu atau lebih orang.

Sedangkan pelayanan publik menurut Ratminto dan Atik (2005:5) mengikuti keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, mendefinisikan Pelayanan Publik sebagai bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha

Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Undang – undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam pasal 1 (satu) menjelaskan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik baik pemerintah (Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah) maupun swasta yang pelaksanaannya diatur oleh undang-undang.

B.4 Pelayanan Publik Sektor Perikanan

Melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur urusan kelautan menjadi Urusan Pemerintahan Pilihan, di mana desentralisasi kewenangan laut hanya sampai di tingkat provinsi. Sedangkan untuk sektor perikanan, kabupaten/kota masih memiliki kewenangan, sekalipun lebih banyak untuk urusan pemberdayaan nelayan kecil. (YM,Dapu. 2016:69)

Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, provinsi diberi kewenangan untuk mengelola Sumber Daya Alam di laut yang meliputi

eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, ikut serta dalam memelihara keamanan di laut dan ikut serta dalam memelihara keamanan kedaulatan negara.

Sementara itu di dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan acuan dalam mengelola potensi perikanan. Beberapa kegiatan pelayanan publik sektor Perikanan, berdasarkan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan diantaranya :

➤ **Penangkapan Ikan**

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. (Undang-undang Nomor 31 tahun 2009 tentang Perikanan)

Di sektor perikanan pelayanan publik salah satunya dilakukan melalui penyediaan fasilitas ataupun peralatan yang memadai untuk mendukung aktivitas kegiatan penangkapan ikan khususnya petani ikan dan nelayan. Fungsi pengawasan juga perlu dilakukan, sehingga kegiatan penangkapan ikan tidak merusak lingkungan (Dewi, A, et.al.2014:277)

2. Pembudidayaan Ikan

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau

membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. (Undang-undang Nomor 31 tahun 2009 tentang Perikanan)

Kegiatan pembudidayaan ikan perlu mendapat perhatian serta bantuan dari pemerintah. Hal tersebut karena banyak ditemukan kasus budidaya ikan yang gagal panen dan mengalami kerugian karena tingginya biaya produksi yang tidak mampu di penuhi oleh pembudidaya serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan budidaya, Hal tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2014) di Kabupten Banyuwangi. (Dewi, A, et.al.2014:277)

B.4 Metode Penelitian

B.4.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian ini berisi tentang rencana kegiatan secara sistematis untuk menjawab tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Menurut Moleong (1988:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metodologi alamiah.

Penelitian kualitatif berusaha menemukan teori, teori substantif atau formal, yang kesemuanya jelas berasal dari data Moleong (1988:48). Dengan memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (*actual*) dan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya. Sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Kapasitas Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Perikanan Kabupaten Pangandaran.

B.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga (3) teknik pengumpulan data yaitu:

1) Observasi

Teknik observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek-objek alam yang lain. Sutrisno Hadi (1986 dalam Sugiyono 2012:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian ini teknik observasi yang di gunakan adalah teknik observasi terstruktur yaitu kegiatan observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. (Sugiyono. 2012:146)

2) Wawancara

Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan pendekatan menggunakan Petunjuk Umum Wawancara (Moloeng. 2014 : 187). Dimana jenis ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis

besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup.

Pedoman (petunjuk umum) wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek relevan telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian interviewer harus memikirkan bagaimana pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara konkrit *actual* saat wawancara berlangsung (Patton dalam Riska. 2016:34).

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan arsip atau dokumen sebagai sumber data yang dapat diperinci dengan jalan melihat, mencatat dan mengabadikan dengan gambar. Dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian karena dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan. (Moloen, 2004:35 dalam Riska:2016).

C. Hasil Penelitian

C.1 Gambaran Kapasitas Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Beserta Yang Mempengaruhinya.

Pada bab ini penyusun memaparkan Kapasitas Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan terhadap Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah sektor Perikanan Kabupaten Pangandaran, sebagai hasil analisis mendalam terhadap data yang diperoleh.

Pemaparan mengacu kepada teori Dewi, A, et.al (2014:277), secara umum kapasitas meliputi tiga (3) elemen, yaitu: 1). Elemen Kelembagaan dan tatakelola; 2). Elemen sumber daya manusia dan; 3). Elemen Kebijakan. Berikut ini pemaparan Kapasitas Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan berdasarkan pada teori diatas:

C.1.1 Elemen Kelembagaan dan Tatakelola

Kelembagaan dan Tatakelola ini dijabarkan melalui struktur organisasi, visi dan misi lembaga, mekanisme kerja dan prosedur serta kepemimpinan melalui koordinasi (Dewi, A, et.al. 2014:277). Berdasarkan teori tersebut maka:

1) Struktur Organisasi, Visi dan Misi sesuai sektor perikanan.

Milen (2004 dalam Dwi, J, et.al. 2013:107) menjelaskan bahwa salah satu penguatan organisasi memfokuskan pada proses dan struktur organisasi yang dapat mempengaruhi bagaimana organisasi tersebut menetapkan tujuannya dan menyusun pekerjaannya secara intensif, dalam kelembagaan perlu adanya struktur organisasi yang memadai.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah.

Adapun Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran

memiliki struktur organisasi sesuai PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, yaitu Bapak Wawan Kustawan terkait struktur organisasi:

“Struktur Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan, saat ini sudah berjalan dengan baik mulai dari Kepala Dinas sampai dengan Kepala Seksi semua memiliki tugas dan peran masing-masing, secara keseluruhan struktur sudah pas artinya dengan struktur yang ada kita berusaha mengoptimalkan SDM kita untuk mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian Visi dan Misi disusun berdasarkan analisis peluang dan kebutuhan daerah, selama ini juga visi dan misi itu menggambarkan visi dan misi Kabupaten Pangandaran yang dijabarkan menjadi tiap OPD.” (Sumber: wawancara 17 Januari 2017)

2) Mekanisme Kerja.

Faktor lain dalam kelembagaan dan tatakelola adalah mekanisme kerja. Suatu organisasi mempunyai mekanisme kerja yang bisa mewujudkan pemerintahan yang baik sesuai yang dicita-citakan bersama dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan bersama.

Sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Milen (2004 dalam Dwi, J, et.al. 2013:108) bahwa mekanisme kerja

merupakan proses kerja yang hanya bisa difungsikan dan dipercepat melalui bantuan dari luar. Mekanisme kerja di perlukan secara Internal dan Ekstrenal yang di jalin dengan berbagai pihak yang berkaitan, yang di wujudkan melalui : 1). Koordinasi; 2). Kemitraan dan; 3) Program Kerja. (Dewi, J, et.al. 2013:108)

Faktor lain yang turut mempengaruhi baik dan buruknya mekanisme kerja adalah Infrastruktur dan Anggaran (Musyadad. 2011, dalam Agung. 2013:9). Berdasarkan teori di atas, pemaparan mekanisme kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

a) Koordinasi dan Kemitraan sektor Perikanan Grindle (1997 dalam Samsu et.al. 2015:96) menyebutkan tentang kapasitas pada organisasi publik di negara-negara berkembang, kapasitas dipengaruhi oleh sejauh mana organisasi mampu mendorong jaringan komunikasi dan koordinasi dalam melaksanakan tanggungjawab secara efektif. Jaringan dapat disusun dari organisasi yang berada di dalam dan diluar sektor publik.

Pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan berdasarkan keterangan Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Bapak Ema Sukmana menjelaskan bahwa koordinasi yang dilakukan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- Koordinasi internal dengan aparatur Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan.
- Koordinasi yang dijalankan dengan *stakeholder* dan OPD terkait. (Sumber:Wawancara 29 Januari 2018)

b) Implementasi Program Kerja Sektor Perikanan untuk peningkatan PAD.

Program kerja DKPKP yang secara langsung dan satu-satunya yang memberikan kontribusi terhadap PAD sektor Perikanan adalah Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Melalui Peraturan Daerah Nomor 38 tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan yang dikukuhkan dengan Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan. Kedua peraturan tersebut mengatur besarnya tarif retribusi sebesar 3,5 persen dari harga atau nilai transaksi yang dibebankan ke pada pembeli atau bakul. Dimana dari 3.5 persen tersebut di bagi menjadi 2.5% diperuntukan sebagai Penerimaan Daerah dan 1.50% diperuntukan sebagai penerimaan pengelola dan penyelenggara lelang. (DKPKP. 2018)

Implementasi peraturan diatas terbukti dengan perolehan PAD yang berhasil terkumpul sejak tiga tahun terkakhir dari 2015-2017 yang perolehannya dapat dilihat dalam tabel 4.1 halaman 65 (DKPKP, BPKD. 2018)

Disamping retribusi tempat pelelangan ikan, DKPKP memiliki program Balai Benih Ikan yang pada tahun 2018 ini masih dalam proses pelaksanaan. (DKPKP. 2018). Balai Benih Ikan ini merupakan salah satu program yang dipersiapkan untuk dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sektor perikanan yang kegiatannya banyak dilakukan oleh Kelompok Pembudidaya Ikan, berbeda dengan perikanan tangkap yang kegiatan nya banyak dilakukan oleh nelayan. Berikut penuturan Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKPKP Bapak Tata terkait Program Balai Benih Ikan :

“salah satu upayanya ada Balai Benih Ikan (BBI), BBI ini mulai berdiri pada April 2017 jadi sampai saat ini kita belum ada target capaian dan belum maksimal di jalankan karena masih dalam tahap pembenahan yang kedepan diarahkan untuk menjadi salah satu program yang dapat memberikan kontribusi terhadap PAD”. (Wawancara: 17 Januari 2018)

Selain ke dua program tersebut, DKPKP banyak dibantu oleh program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diantaranya pada 2017 Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkenalkan aplikasi Nelpin (Nelayan Pintar) kepada puluhan nelayan untuk mendukung aktifitas mereka dalam penangkapan ikan. Aplikasi tersebut menggabungkan berbagai informasi berbasis Android, seperti informasi peta prakiraan daerah penangkapan ikan (PPDP), informasi cuaca, informasi kesuburan perairan dan informasi harga ikan. (<http://www.pikiranrakyat.com/jawabarat/2017/11/15/puluhan-nelayan-pangandaran-diperkenalkan-aplikasi-nelpin-413789>)

Program KKP tersebut ke depan diprediksi akan meningkatkan produksi perikanan budidaya yang juga menjadi program kerja DKPKP yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan. (Sumber: Wawancara Sekretaris DKPKP pada 17 Januari 2017)

c) Sarana prasarana dan Anggaran.

Menurut Kaho (1991 dalam Dwi, J, dkk, 2013:109) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi otonomi daerah terhadap kinerja salah satunya peralatan yang cukup baik seperti alat-alat perkantoran, alat komunikasi, alat transportasi.

Sedangkan didalam Permenpan Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, bahwa sarana dan/prasarana menjadi unsur yang penting didalam pelayanan publik. Adapun sarana prasarana yang dimiliki Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan saat ini adalah bangunan kantor beserta alat-alat perkantoran, alat komunikasi.

Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan, Bapak Tata terkait insfrastruktur Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan, sebagai berikut :

“Fasilitas yang ada sekarang, ya kita gunakan sementara sesuai dengan kemampuan hari ini, karena jujur saja sarana dan prasarana termasuk bangunan kantor kan kita belum maksimal. Bangunan kantor kita masih nyewa masih pinjem termasuk saranya juga.”(Wawancara pada 17 Januari 2017)

Selain sarana dan prasarana kantor, Infrastruktur kelautan dan perikanan juga masih belum lengkap tersedia, seperti kebutuhan alat pemecah gelombang (*Beepwater*), kelengkapan infrastruktur TPI seperti realisasi perencanaan pembuatan TPI *Higienis*.

C.2 Sumber Daya Aparatur

Dalam kapasitas kelembagaan sumber daya manusia menjadi unsur yang sangat penting. Grindle (1997 dalam Samsu et.al.2015:97) menyebutkan *Human Resources Dimension* (Dimensi Sumber Daya Manusia) berfokus ke pada bagaimana

SDM memiliki kemampuan untuk menciptakan kinerja yang efektif.

Sedangkan di dalam Permenpan No. 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar *Pelayanan*, kompetensi dan jumlah aparatur menjadi unsur yang penting didalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan memiliki jumlah *pegawai* sebanyak 30 orang termasuk pegawai yang masih honorer. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKPKP Kabupten Pangandaran, yaitu Bapak Tata yang menuturkan :

“Pertama gini kalo soal SDM, ada dua hal yang menjadi permasalahan yang pertama dari sisi kuantitas atau jumlah memang belum maksimal kita masih melibatkan tenaga honorer dan jujur saja kalo tidak ada tenaga honorer kemungkinan dinas itu walau berjalan tapi tersendat. Yang ke dua dari sisi kualitas, banyak aparatur kita yang pendidikan nya tidak sesuai dengan bidangnya, misalnya ada sarjana pertanian di perikanan, ada sarjana pendidikan di perikanan. Untuk pengembangan SDM kita di DPA ada pembinaan meskipun program nya sedikit di cut karena terbatas di anggaran jadi porsinya tidak terlalu besar karena ada program lain yang lebih prioritas.” (Wawancara pada 17 Januari 2018)

Kemudian Bapak Mahmud, SH, MH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandara juga menuturkan :

“Secara umum di kita hambatan nya, karena kita masih baru 5 tahun Otonomi Daerah sehingga SDM memang masih terbatas karena cenderung tiap tahun pegawai makin berkurang.” (Wawancara pada 31 Januari 2018)

D. Penutup

D.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa Kapasitas Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sektor Perikanan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Kapasitas DKKP berkontribusi terhadap peningkatan PAD sektor Perikanan seperti terjadinya penurunan PAD dari tahun 2015 ke 2016 sebesar 96% dan peningkatan PAD terjadi dri tahun 2016 ke 2017 sebesar 49.9% dan dapat di lihat perolehan PAD tiga tahun terakhir (2015-2017) dengan rata-rata perolehan sebesar Rp. 2,070,959,670 atau 99,03%. Adapun kapasitas di lihat dari tiga indikator adalah sebagai berikut:

1. Elemen Kelembagaan dan tatakelola yang paling berpengaruh adalah visi dan misi dalam meningkatkan produksi perikanan dan meningkatkan infrastruktur perikanan, kemitraan yang sudah di lakukan dengan lembaga kenelayan, beberapa OPD dan kementerian kelautan dan anggaran yang masih terbatas sehingga terbatas juga sarana prasarana Dinas dan Infrastruktur Perikanan.
2. Elemen Sumber Daya Manusia yang paling berpengaruh adalah belum sesuai nya jumla pegawai dan beban kerja dan juga masih lemahnya kompetensi aparatur dibidang perikanan serta sdm Nelayan yang masih tradisional.
3. Elemen kebijakan yang paling berpengaruh adalah Ketepatan Program

dengan pembagian Retribusi sebesar 3,5 persen yang disepakati oleh Bakul, nelayan dan penyelenggara TPI dan manfaat dari kebijakan tersebut adalah adanya tunjangan kesehatan dan hari raya bagi bakul dan nelayan sehingga berpengaruh terhadap Produktifitas nelayan.

D.2 Saran

Meningkatkan kompetensi aparatur di Bidang Perikanan Tangkap, Meningkatkan keahlian nelayan di bidang perikanan tangkap dan juga meningkatkan keahlian Pokdakan dalam pembudidayaan ikan, Meningkatkan sarana prasarana Dinas dan Infrastruktur nelayan seperti peningkatan kapasitas kapal lebih dari 5 GT. Melakukan kegiatan kemitraan dan penyelenggaraan perizinan bagi investor untuk peningkatan nilai tukar hasil produksi perikanan yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sektor Perikanan, Melakukan kemitraan dengan Industri dalam pengelolaan hasil perikanan. Menyediakan aplikasi yang berisi informasi tentang musim, cuaca, potensi ikan kegiatan penyelamatan, Penelitian lebih lanjut tentang pembentukan kebijakan dan pelayanan perijinan dan investor disektor kelautan dan perikanan.

E. Daftar Pustaka

BUKU

- Darmawati, Hermawan. 1990 "*Manajemen Risiko*". Jakarta: Bumi Aksara.
- Dwiyanto, A. 2014. "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik". Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. 2015. "Reformasi Birokrasi Kontekstual". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fahmi, Irham. 2013. *Perilaku Organisasi. Teori, Aplikasi Dan Kasus*. Bandung: Alfabeta Hanafi,

Mamduh M. 2006. "Manajemen Risiko". Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi

Ilmu Manajemen YKPN. Haryatmoko.2013. "Etika Publik Untuk Integritas Pejabat dan Politisi". Gramedia Pustaka Utama.

Irawan, Bambang. 2016. "Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik". Jakarta: Publika Press

Moleong, Lexy J. 2014. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung : PT Remaja Rosdakarya. cet: 33.

Ratminto dan Septi, A Winarsih. 2005 "Manajemen Pelayanan :Pengembangan Model Konseptual, Penerapan *Citizen's Charter* dan Standar Pelayanan Minimal". Yogyakarta :PustakaPelajar.

Siahaan, Marihot. P. 2005."Pajak Daerah dan Retribusi Daerah". Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiono. 2012. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D". Bandung : Alfabeta.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009. Tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Pertumbuhan Aset : Studi di Propinsi KEPRI melalui Pendekatan Analisis Jalur”.

<http://riset.umrah.ac.id/?p=455> diakses 21 Desember 2017 jam 23.07 WIB.

Rujukan dari internet

Dewi, A, dkk.2014 “Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah studi kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi”.

pada

[:http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/376d](http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/376d) diakses 22 Desember 2017.

<http://cimerakpangandaran.blogspot.co.id/2014/02/optimalikan-potensi-kelautan.html> diakses 22 Oktober 2017

Dwi, J, dkk. (2013) “*Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang*”, <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/10> diakses 5 November 2017.

Kusumastanto Tridoyo. 2011 “Pengembangan Sumber Daya Kelautan Dalam Memperkokoh Perekonomian Nasional Abad 21”.

Pada <http://www.lfip.org/english/pdf/bali>

-

[seminar/pemberdayaan%20sumber%20daya%20kelautan%20-tridoyo%20kusumastanto.pdf](http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/pemberdayaan%20sumber%20daya%20kelautan%20-tridoyo%20kusumastanto.pdf) diakses 27 desember 2017.

M. Dedi. 2004. “Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Pesisir Sebagai Alternatif Pembangunan Indonesia Masa Depan”. https://www.bappenas.go.id/files/7713/5230/0987/kebijakanpesisirmaskur__20081123172012__1224__0.pdf diakses 17 Desember 2017 jam 16.00.

Manik, Tumpal dan Lengga, I. Sari M. 2014 “Analisis Pengaruh Industri Maritim Melalui Transportasi Perhubungan Laut, Pariwisata Bahari, Perikanan Tangkap Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan